

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas Muh. Nursal N.S. (2022). *Kumpulan Asas Hukum*. Jakarta:Kencana.
- Arief, Irsan. (2021). *Memahami Kesalahan Penyusunan Surat Dakwaan*. Jakarta Pusat. Mekar Cipta Lestari.
- Asdar Nor. (2023). *Asas-Asas Hukum Kontemporer*. Jawa Barat:CV Jejak.
- Chazawi, Adami. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami. Ferdian, A. (2014). *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Effendi, Tolib. (2021). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Hamzah, Andi. (2016). *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. PT. Alumni.
- Hiariej, E.O.S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hiariej, E.O.S. (2017). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Joubert, JJ. (2016). *Criminal Procedure Handbook*. Cape Town: Juta and Company Ltd.
- Lamintang, P.A.F. & Lamintang, Theo. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makarim, Edmon. (2022). *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mappaselleng, N.F dan Kadir, Z.K. (2020). *HUKUM ACARA PIDANA ADVERSAL : pemahaman awal dan proses investigasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran
- Marzuki, Peter. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Muladi & Sulistyani, Diah. (2021). *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Criminal*. Bandung: Alumni.

- Nursya (2012). *Percobaan penyertaan gabungan tindak pidana serta delik aduan pada KUHP dan RUU KUHP*. Jakarta: Sinar aksara grafindo.
- Prasetyo, Teguh. (2019). *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Rahmad R.A. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Rosadi, S.D. (2018). *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Samosir, C.D dan Samosir T.A. (2022). *Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang Hukum Pidana*. Bandung: CV. Nuansa Aulia
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Bandung: PT. Tatanusa.
- Sinurat, A. (2024). *Percobaan, penyertaan, dan gabungan tindak pidana (PPGTP)*. Kupang: Penerbit Tangguh Denara Jaya. Hlm. 28
- Soerjono, S & Mamudji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, Andi & Asis, Abd. (2017). *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suyanto. (2018). *"Hukum Acara Pidana"*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Zainudin Ali. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Aripkha, N. & Asufie, K.N. (2024). *Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Elektronik dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia*. Notary Law Jurnal, Vol 3, Issue 1 April-Juni 2024, hlm. 99.
- Makarim, E. (2019). *Kerangka Kebijakan dan Reformasi Hukum untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(3), 701-723.
- Maskun, M. & Meilarati, W. (2017). *Aspek Hukum Penipuan Berbasis internet*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(3), 465-487.
- Mulyadi, Lilik. *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi*.

Yusuf, D.M., Agustania, M., & Zulaiha, S. (2022). *Tindak Pidana Kejahatan Pemalsuan Data (Data forgery) dalam Bentuk Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jurnal Pendidikan dan Konseling.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.